

**PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GOLONGAN I DAN GOLONGAN II  
DI KABUPATEN NGAWI**

**SKRIPSI**



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Jember

Oleh

*Rini Widnyawati*

NIM. 960810101230

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2000**

Asal	: Madich Pembelian	Klass 339.4 WID p
Terima	: Tol, 03/01.	
No. Induk	: 00235534.	

## JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GOLONGAN I DAN GOLONGAN II  
DI KABUPATEN NGAWI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**N a m a** : Rini Widyawati

**N. I. M.** : 960810101230

**Jurusan** : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

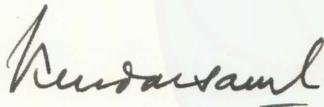
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

9 Desember 2000

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar **S a r j a n a** dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

### Susunan Panitia Penguji

**Ketua,**

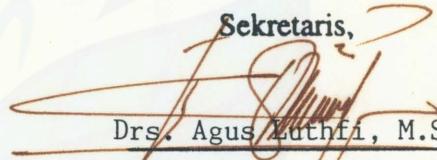


Dra. Ken Darsawarti, MM.

NIP. 130 531 975



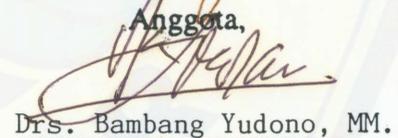
**Sekretaris,**



Drs. Agus Luthfi, M.Si.

NIP. 131 877 450

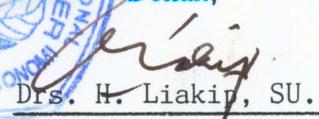
**Anggota,**



Drs. Bambang Yudono, MM.

NIP. 130 355 409

**Mengetahui/Menyetujui**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Ekonomi**  
**Dekan,**



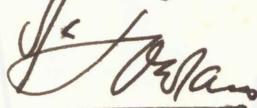
Drs. H. Liakip, SU.

NIP. 130 531 976

**TANDA PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Pendapatan Terhadap Pola Konsumsi  
Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II di  
Kabupaten Ngawi.  
Nama Mahasiswa : Rini Widyawati  
NIM : 960 810 101 230  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Pembimbing I



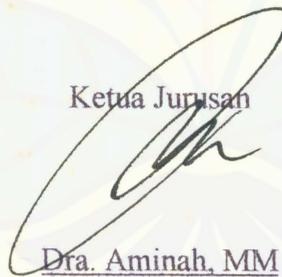
Drs. Bambang Yudono  
NIP. 130 355 409

Pembimbing II



Dra. Anifathul Hanim  
NIP. 131-953 240

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM  
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan: 10 November 2000

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Ayahanda Sudarno dan Ibunda Suparmi yang ananda hormati dan cintai, yang tiada sunyi akan do'a sebagai tanda bakti dan terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang tercurah kepada ananda selama ini.
2. Mbak Titik sekeluarga yang selalu memberikan do'a dan kasih sayangnya.
3. Mas Hari yang selalu memberikan kasih sayangnya tanpa penulis sadari.
4. Yuli ... terima kasih atas suportnya
5. Almamaterku yang kubanggakan

**MOTTO:**

Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur berbuat dholim lalu beristighfar, dan di dholimi lalu memaafkan, maka bagi mereka keselamatan dan bagi merekalah orang-orang yang mendapat hidayah.

**(H.R. Al-Baihaqi)**

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari semua urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

**(Al-Qur'an, surat Alam Nasyroh: 5 – 7)**

## ABSTRAKSI

Pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II adalah merupakan pegawai negeri yang tergolong kedalam masyarakat yang berpenghasilan rendah apabila dilihat dari jumlah penerimaan gaji tiap bulannya. Pegawai negeri sipil tersebut berusaha mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup tiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba mengetahui pengaruh pendapatan yang diterima tiap bulan terhadap pola konsumsi pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II.

Penelitian ini akan membahas pengaruh pendapatan pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II terhadap pengeluaran konsumsinya. Penelitian ini dilakukan pada pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II di Kabupaten Ngawi dengan menggunakan data primer dan data skunder yang bersumber dari kantor pemda Ngawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat antara pendapatan yang diterima dengan pola konsumsi dari masing-masing keluarga PNS golongan I dan golongan II. Pengaruh tersebut terlihat dari koefisien korelasi ( $r$ ) yang diperoleh. Rata-rata pendapatan sampingan yang diterima oleh pegawai negeri sipil golongan I lebih besar dari golongan II karena gaji yang diterima tiap bulan adalah lebih besar dari golongan II.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan bahwa pengaruh perubahan pendapatan yang diterima sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi dari tiap-tiap keluarga PNS baik golongan I dan golongan II.

Kata Kunci: PNS Golongan I dan Golongan II, Pendapatan, Pengeluaran Konsumsi

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmad dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis Menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Yudono dan Ibu Dra. Anifathul Hanim selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditengah kesibukannya telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran dan pengarahan selama proses penulisan hingga terselesainya skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Ketua, Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Bapak/Ibu karyawan Pemerintah Daerah (Pemda) Ngawi yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian.
5. Teman-temanku SP/GP'96, sobatku Ciplis, Lastri, dan Rikka yang telah banyak membantu dan memberi semangat.
6. Mbak Ratih terima kasih atas nasehat dan dorongannya selama ini, Itenk "Yayuk" dan P5713U-nya yang telah menemani selama ini.
7. Mas Yudi terima kasih 6412-nya yang telah menemani disaat terakhir penulisan.
8. Teman kost Kalimantan IV/ 76
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata , penulis berharap semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang memerlukannya.

Jember, Desember 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Sebelumnya.....	7
2.2 Landasan Teori.....	7
2.3 Hipotesis.....	14
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	15
3.2 Responden Penelitian.....	15
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.4 Metode Analisis Data.....	16
3.5 Definisi Operasional.....	19

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Objek yang Diteliti.....	20
4.1.1 Pendapatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II.....	22
4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II.....	30
4.2 Hasil Analisis Data .....	32
4.3 Pembahasan.....	35
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	38
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	40
LAMPIRAN.....	42

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Objek yang Diteliti.....	20
4.1.1 Pendapatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II.....	22
4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II.....	30
4.2 Hasil Analisis Data .....	32
4.3 Pembahasan.....	35
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	38
5.2 Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA .....	40
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1. Daftar Penyempurnaan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II	13
2. Daftar Pegawai Negeri Sipil Daerah per Golongan di Kabupaten Ngawi	21
3. Daftar Pendapatan Gaji Pegawai negeri Sipil Golongan I dan Golongan II di Kabupaten Ngawi	24
4. Perbandingan Pengeluaran Pokok dan Non Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II	25
5. Jumlah Tanggungan, Status Tanggungan dan Rata-rata Tanggungan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II di Kabupaten Ngawi	28
6. Daftar Alokasi Pengeluaran konsumsi Masyarakat	30
7. Perbedaan Pola Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II	37

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Jumlah perubahan pendapatan per bulan PNS golongan I	42
2. Jumlah perubahan pendapatan per bulan PNS golongan II	43
3. Jumlah perubahan pengeluaran per bulan PNS golongan I	44
4. Jumlah perubahan pengeluaran per bulan PNS golongan II	45
5. Marginal Propensity to Consume pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II	46
6. Tingkat Disposable Income ( $Y_d$ ) dan tingkat konsumsi ( $C$ ) per bulan pegawai negeri sipil golongan I	47
7. Tingkat Disposable Income ( $Y_d$ ) dan tingkat konsumsi ( $C$ ) per bulan pegawai negeri sipil golongan II	48
8. Analisis Data	49
9. Daftar kuisioner responden	55

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilakukan secara bertahap, pada hakekatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Pembangunan adalah suatu usaha secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat memperbaiki hidupnya (Bintoro Tj dan Mustopa Didjaya, 1980: 5). Pembangunan sumberdaya manusia juga merupakan sasaran dari pemerintah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berguna bagi bangsa dan negara.

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu dari sasaran pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Pegawai negeri yang berfungsi sebagai aparat negara, abdi negara dan abdi masyarakat perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya yang dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri adalah unsur aparat negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah dan pelaksana pembangunan. Setiap pegawai negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.

Pegawai negeri tersebut masih dibagi lagi menjadi pegawai negeri sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia ( TNI ). Undang-Undang No. 8 Tahun 1987 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil

masih dibagi lagi berdasarkan kepangkatannya menjadi pegawai negeri sipil golongan I, pegawai negeri sipil golongan II, pegawai negeri sipil golongan II, dan pegawai negeri sipil golongan IV. Pegawai negeri sipil tersebut digolongkan berdasarkan tingkat kemampuan dan tingkat akademis yang dimiliki. Pegawai negeri sipil golongan I tentunya pada saat mereka masuk hanya berdasar kemampuan akademis yang rendah semisal ijazah SD atau SMP dan mereka digolongkan sebagai pekerja biasa. pegawai negeri sipil golongan II tentunya juga memiliki kemampuan akademis yang singkat atau dua tingkat diatas pegawai negeri sipil golongan I, demikian pula berlaku bagi golongan III dan pegawai negeri sipil golongan pegawai negeri sipil golongan IV.

Tingkatan golongan itu dengan sendirinya akan mempengaruhi dalam penentuan tingkat gaji sebagai balas jasa terhadap jasa-jasa yang telah diberikan pada negara, semakin rendah golongan semakin rendah gaji yang diterima demikian juga sebaliknya. Gaji yang diterima dari masing-masing pegawai negeri sipil disesuaikan dengan masa kerja dan golongannya. Penelitian ini menitik beratkan pada pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II yang masih mempunyai gaji tergolong rendah jika dikaitkan dengan kondisi perekonomian negara Indonesia saat ini. Kenyataan yang dihadapi bahwa gaji yang diterima tiap bulan masih belum mencukupi kebutuhan hidup.

Setiap pegawai negeri sipil beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gaji yang diterima tiap bulan, sehingga dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Pemerintah selalu berusaha agar gaji yang diberikan kepada tiap pegawai negeri sipil secara bertahap dapat mengarah kepada pemberian gaji yang layak. Gaji dapat dikatakan layak apabila dapat mencukupi kebutuhan pokok dan kebutuhan non pokok. Gaji yang diterimakan kepada pegawai negeri sipil berusaha disesuaikan dengan perhitungan yang rasional untuk mencukupi kebutuhan. Pemberian gaji sudah ditetapkan dengan sistem gaji yang baik akan tetapi kemampuan keuangan negara belum mencukupi untuk pemberian gaji yang sesuai dengan pemberian gaji yang layak. Namun, pemerintah

tetap mengusahakan dan memperhatikan perbaikan-perbaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (Soenardi Dwidjoyosoestastro dkk, 1987:8.6).

Kenyataan tersebut diatas mendorong atau memotivasi setiap pegawai negeri sipil untuk berusaha memenuhi kebutuhan tiap bulan dengan mencari usaha sampingan. Usaha sampingan ini dilakukan di luar jam kantor dengan pertimbangan setelah jam kantor masih banyak sisa waktu luang sehingga bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Kebutuhan setiap individu selalu mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan zaman. Fenomena kenaikan gaji selalu diiringi dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menyebabkan gaji yang diterima setiap bulan dapat dikatakan belum mencukupi kebutuhan.

Pendapatan yang diterima dari usaha sampingan tiap-tiap pegawai negeri sipil harus dapat menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dengan asumsi pada saat itu tidak ada faktor-faktor yang menghambat penurunan pendapatan misalnya bangkrut. Pengaruh dari kenaikan tersebut menyebabkan perubahan gaya atau pola hidup individu atau keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhannya. Teori ekonomi Keynes menyebutkan bahwa konsumsi adalah fungsi dari pendapatan yang berarti bahwa pendapatan yang didapat oleh suatu masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat tersebut ( Ace Partadiredja, 1982: 100 ). Penerimaan pendapatan baik dari gaji maupun dari usaha sampingan sangat mempengaruhi konsumsi dari tiap-tiap keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II.

Penelitian ini akan meneliti tentang perubahan pendapatan yang berpengaruh pada pola konsumsi pegawai negeri sipil golongan I dan pegawai negeri sipil golongan II di kabupaten Ngawi. Ngawi merupakan kota yang masih dapat dikatakan sebagai kabupaten yang memiliki daerah kantong kemiskinan yang tinggi. Ngawi merupakan kota kecil dengan pendapatan per kapita penduduknya masih dikatakan sedang. Hal tersebut menjadi pertimbangan peneliti dalam mengetahui pengaruh kondisi geografis terhadap pola hidup para pegawai negeri sipil baik golongan I dan golongan II. Penelitian ini berpedoman pada penelitian yang telah dilakukan di

Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing pegawai negeri sipil sangat mempengaruhi pada pola konsumsi keluarga pegawai negeri sipil tersebut. Keluarga pegawai negeri sipil golongan I cenderung memiliki pola konsumsi di bawah keluarga pegawai negeri sipil golongan II. Pegawai negeri sipil golongan I selalu berusaha memenuhi pola konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sedangkan pegawai negeri sipil golongan II cenderung memenuhi pola konsumsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Pengeluaran pokok dan pengeluaran tambahan pegawai negeri sipil golongan I menunjukkan angka yang lebih kecil dibandingkan pengeluaran tambahan dan pengeluaran pokok pegawai negeri sipil golongan II.

Teori dari ahli ekonomi Keynes menyebutkan ada kecenderungan bahwa individu atau rumah tangga yang mempunyai penghasilan minimum selalu mempunyai hasrat mengkonsumsi marginal atau tambahan yang tinggi ( Lipsey dkk, 1995: 66 ). Hal tersebut berarti bahwa setiap tambahan pendapatan yang diterima dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pegawai negeri sipil golongan I jika dilihat dari gaji yang diperoleh tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang semakin tinggi nilainya demikian juga halnya dengan pegawai negeri sipil golongan II. Pendapatan yang diterima oleh masing keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan pegawai negeri sipil golongan II tentunya berbeda dalam hal pengalokasian konsumsinya. Teori ekonomi makro menyebutkan bahwa dua rumah tangga yang mempunyai pendapatan yang hampir sama sangat berbeda dalam mengalokasikan pendapatannya baik untuk keperluan konsumsi, tabungan dan investasi ( Lipsey dkk, 1985: 64 ).

Pegawai negeri sipil golongan I dan pegawai negeri sipil golongan II di kabupaten Ngawi sebagian besar masih tergolong kedalam masyarakat yang memiliki pola hidup sederhana. Para pegawai negeri sipil golongan I dan pegawai negeri sipil golongan II banyak yang mempunyai pekerjaan sampingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tiap bulannya selain menerima gaji tiap bulannya. Mereka

beranggapan bahwa gaji yang diterima tiap bulannya belum dapat mencukupi kebutuhan tiap bulannya. Pendapatan yang diterima tiap bulan dari para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II terdiri dari gaji pokok yang diterima tiap bulannya dan penghasilan sampingan dari usaha sampingan yang dikerjakannya.

Uraian tersebut diatas merupakan bahan pertimbangan bagi peneliti untuk mencoba mengetahui pengaruh yang diakibatkan dari pendapatan yang diterima oleh masing-masing pegawai negeri sipil baik golongan I dan golongan II dengan pertimbangan bahwa disamping menerima pendapatan dari gaji mereka juga menerima pendapatan dari usaha sampingan baik dari usaha di bidang pertanian, jasa, perdagangan dan lain sebagainya. Pendapatan yang diterima tersebut merupakan faktor penentu yang mempengaruhi keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II dalam mengalokasikan untuk berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhinya. Tiap-tiap individu selalu mempunyai perbedaan dalam pola konsumsinya sesuai dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki semakin luas wawasan mereka dalam mengetahui berbagai macam kebutuhan yang berbeda.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Pendapatan yang diterima tiap bulan dari pegawai negeri sipil terdiri dari dua macam yaitu dari gaji pokok dan usaha sampingan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu berapa besar pengaruh pendapatan yang diterima para pegawai negeri sipil golongan I dan pegawai negeri sipil golongan II dan bagaimana pengeluaran konsumsi antara pegawai negeri sipil golongan I dengan pengeluaran konsumsi pegawai negeri sipil golongan II.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan

keluarga pegawai negeri sipil golongan II di Kabupaten Ngawi dan juga ingin mengetahui pengeluaran konsumsi tiap-tiap keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai pelengkap data bagi penelitian selanjutnya
2. Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang berhubungan dengan alokasi pendapatan untuk konsumsi
3. Sebagai pedoman bagi para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II dalam mengalokasikan pendapatannya.



## II. Tinjauan Pustaka

### 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian sebelumnya

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mengambil lokasi di Kotamadya Surabaya dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan terhadap Pola konsumsi Keluarga Pegawai negeri Sipil Golongan I dan Golongan II di Kantor Pemda Surabaya ( Wiwik, 1995 ). Penelitian sebelumnya menggunakan metode analisis data regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh adanya perubahan pendapatan dengan konsumsi yang diterima oleh masing-masing keluarga Pegawai negeri Sipil Golongan I dan Golongan II. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jelas terdapat pengaruh yang nyata dari pendapatan yang diterima dengan pola konsumsi dari para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II. Ada perbedaan pola konsumsi antara keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II. Dikaitkan dengan penelitian ini, maka akan disesuaikan dengan kondisi dari Kabupaten Ngawi yaitu dalam hal tingkat kesejahteraannya.

### 2.2 Landasan Teori

#### 2.2.1 Hubungan Pendapatan dengan Konsumsi

Keyness berpendapat bahwa hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan keluarga dapat dilihat dalam bentuk fungsi konsumsi ( Nopirin PhD, 1986: 86 ). Fungsi konsumsi merupakan rencana konsumsi untuk berbagai tingkat pendapatan. Pendapatan di sini yang dimaksud adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau *disposable income*. Pada tingkat disposable income yang rendah pengeluaran rumah tangga adalah lebih besar daripada pendapatannya. Hal ini berarti pengeluaran konsumsi bukan saja dibiayai oleh pendapatan pokok yang diterimanya tetapi juga dari sumber-sumber lainnya misalnya dari tabungan dan pendapatan dari usaha sampingan disamping penghasilan pokoknya.

Pada suatu tingkat disposable income yang cukup tinggi, konsumsi rumah tangga atau keluarga akan sama besarnya dengan disposable incomenya. Apabila

disposable income mencapai tingkat yang lebih besar lagi keluarga tersebut tidak akan menggunakan seluruhnya akan tetapi ada sebagian yang digunakan untuk tabungan ( Sadono Sukirno, 1981: 108 ). Dalam kehidupan masyarakat tentu terdapat berbagai macam cara dalam mengkonsumsi semua kebutuhan sehari-harinya. Pendapatan yang diterima tentu saja berbeda-beda meskipun individu tersebut bekerja di bidang yang sama. Apabila ditinjau dari kondisi masyarakat saat ini, mereka yang mempunyai penghasilan rendah pada umumnya berusaha mengejar pola kehidupan yang hampir sama dengan mereka yang berpenghasilan tinggi terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran untuk pembelian barang-barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) perorangan disebut dengan fungsi konsumsi. Pernyataan tersebut merupakan suatu teori yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi Keynes yang mendasarkan pada hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan empiris yang stabil antara konsumsi dan pendapatan. Fungsi konsumsi ini menunjukkan besarnya tingkat konsumsi suatu rumah tangga (Paul Samuelson dkk, 1996: 126).

Besarnya pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga tergantung pada besarnya jumlah pendapatan yang diterima dan siap untuk dikonsumsi (Lipsey dkk, 1995: 63). Berdasarkan kenyataan yang ada bukan hanya pendapatan saja yang mempengaruhi konsumsi individu atau rumah tangga akan tetapi beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi juga merupakan akibat dari konsumsi. Oleh karena itu tiap-tiap individu atau rumah tangga harus bisa mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi., dalam hal ini biasanya berupa kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan (Paul A. Samuelson dkk, 1996: 124). Rumah tangga atau individu cenderung mengutamakan mengkonsumsi barang-barang dan jasa pokok. Individu atau rumah tangga mempunyai keinginan mengkonsumsi barang dan jasa sehingga mendorong untuk berfikir dan berusaha untuk memenuhinya. Kebutuhan

akan barang dan jasa tersebut akan terpenuhi jika ada alat yang mendukungnya yaitu uang dan untuk mendapatkannya maka orang itu harus bekerja.

Kenyataan yang terjadi dalam suatu masyarakat, tidak pernah ada dua rumah tangga yang menggunakan atau mengalokasikan pendapatan mereka dengan cara yang sama walaupun kebutuhan yang akan dikonsumsi adalah sama. Hal tersebut karena perbedaan pendapatan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga tersebut. Setiap individu atau rumah tangga pada dasarnya dapat mengalokasikan konsumsinya walaupun mempunyai pendapatan yang berbeda. Alternatif yang dapat ditempuh untuk menutupi kekurangan adalah dengan mencari penghasilan tambahan, meminjam dan mengambil tabungan. Hal demikian dalam ilmu ekonomi disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi marginal atau tambahan atau Marginal Propensity to Consume (MPC). MPC adalah tambahan riil pengeluaran konsumsi oleh masyarakat sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diterimanya (Paul A. Samuelson dkk, 1996: 129).

Marginal Propensity to Consume (MPC) menunjukkan perbandingan antara tambahan konsumsi dengan tambahan pendapatan. Angka MPC pada umumnya lebih kecil daripada satu dan mempunyai tanda positif. Apabila angka MPC menunjukkan positif berarti bahwa bertambahnya pendapatan akan berakibat bertambahnya konsumsi. Angka MPC yang lebih kecil dari satu ( $< 1$ ) menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi melainkan ada sebagian yang ditabung atau saving. Keynes menyatakan bahwa hasrat mengkonsumsi marginal suatu rumah tangga yang berpendapatan rendah adalah lebih besar dibandingkan dengan hasrat mengkonsumsi marginal golongan rumah tangga yang berpenghasilan tinggi (Thomas FD, 1972 : 91).

Pendapatan rumah tangga dalam ekonomi makro merupakan salah satu komponen atau variabel ekonomi secara menyeluruh yang menunjukkan pengaruhnya pada konsumsi. Keynes berpendapat bahwa apabila pendapatan yang diterimanya meningkat maka akan mempengaruhi peningkatan tingkat konsumsinya (Nopirin

PhD, 1986: 85). Dalam jangka pendek pengaruh konsumsi disebabkan karena adanya perubahan pendapatan (Gardener Ackly, 1961: 339).

### 2.2.2 Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi

Menurut kenyataan, besar kecilnya pengeluaran konsumsi suatu rumah tangga tidak semata-mata dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan yang diterimanya akan tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain (Sobri, 1996: 89). Penelitian ini menggunakan asumsi jangka pendek dengan kata lain bahwa faktor pendapatan yang mempengaruhi konsumsi dari suatu rumah tangga sedang faktor lain dianggap tetap.

Faktor- faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi adalah :

#### 1. Distribusi Penghasilan

Apabila pendapatan yang diterima oleh rumah tangga itu tinggi tidak terlalu mempengaruhi MPC sebab mereka ini dikatakan mendekati titik kekenyangan sehingga tambahan pendapatan itu akan lebih banyak digunakan untuk memperbesar tabungannya. Sebaliknya apabila tambahan pendapatan yang diberikan pada mereka yang berpenghasilan rendah akan digunakan untuk kebutuhan konsumsi barang pokok.

#### 2. Pendapatan yang Diterima pada Masa Lalu dan yang akan datang

Jika pendapatan yang diterima bertambah maka konsumsi juga akan bertambah, akan tetapi pertumbuhannya tidak begitu cepat. Besarnya pendapatan yang akan diterima di masa datang seberapa banyak akan berpengaruh pada besarnya pengeluaran konsumsi pada masa sekarang. Makin besar expected income seseorang atau rumah tangga, makin besar pula pengeluaran konsumsinya.

#### 3. Jumlah Penduduk

Besarnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsinsuatu rumah tangga. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak

pengeluaran untuk konsumsi pun akan lebih besar daripada perekonomian yang jumlah penduduknya sedikit.

4. Banyaknya Alat Likuid dalam masyarakat

Alat-alat likuid ini dapat dianggap sebagai suatu simpanan yang diakumulasikan dan biasanya simpanan dalam bentuk likuid ini dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan menurunkan hasrat untuk menabung. Resiko yang didapat adalah jika terjadi perubahan harga-harga barang sehingga nantinya akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi.

5. Banyaknya Barang Tahan Lama dalam Masyarakat

Pengeluaran masyarakat untuk konsumsi seberapa banyak dipengaruhi oleh barang-barang tahan lama seperti rumah, mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Pengaruh-pengaruh itu antara lain :

a. bisa menambah pengeluaran konsumsi

Misalnya dengan membeli mobil semakin sering melakukan rekreasi keluar kota sehingga pengeluaran konsumsi bertambah untuk bensin, servis dan sebagainya.

b. bisa mengurangi pengeluaran untuk konsumsi.

Misalnya jika kita mempunyai mobil maka akan berkurang pengeluaran untuk naik kendaraan umum.

6. Kebijakan Finansial dan Marketing dari perusahaan

Pembelian saham yang dilakukan oleh para pelaku bisnis didasarkan pada harapan akan menerima deviden. Besar kecilnya deviden menentukan pendapatan yang diterima akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi. Saham dan besar kecilnya deviden yang diterima itu merupakan salah satu kebijakan finansial dari perusahaan, maka akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi dalam masyarakat. Pengusaha juga berusaha menarik perhatian konsumen dengan harapan untuk meningkatkan penjualan melalui jalur iklan, reklame. Diharapkan dengan adanya iklan dan reklame tersebut akan meningkatkan permintaan

terhadap produk tersebut dan dengan sendirinya tingkat konsumsi dari masyarakat tersebut akan naik.

#### 7. Sikap Masyarakat terhadap Kehematan

Fungsi konsumsi suatu masyarakat yang sebenarnya, banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri terhadap sikap hemat. Makin hemat suatu masyarakat makin rendah MPC. Banyaknya tabungan dan asuransi jiwa menyebabkan fungsi konsumsi menurun. Sikap hemat ini dipengaruhi oleh pemilihan waktu tentang konsumsi masyarakat yang lebih penting, antara konsumsi waktu sekarang dengan waktu yang akan datang.

#### 2.2.3 Perubahan Gaji Pokok

Perubahan pendapatan yang diterima dari gaji disempurnakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997 Tentang Penyempurnaan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Dari PP No. 15 tahun 1993( Himpunan Peraturan Pemda Kabupaten Ngawi,1998 ). Peraturan Pemerintah yang baru tersebut tentunya juga mempengaruhi jumlah gaji yang diterima tiap bulannya. Namun, jika dihubungkan dengan situasi perekonomian negara saat ini maka perubahan tersebut tidak begitu berarti. Keadaan tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II tetap mencari usaha sampingan di luar jam dinas.

terhadap produk tersebut dan dengan sendirinya tingkat konsumsi dari masyarakat tersebut akan naik.

#### 7. Sikap Masyarakat terhadap Kehematan

Fungsi konsumsi suatu masyarakat yang sebenarnya, banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri terhadap sikap hemat. Makin hemat suatu masyarakat makin rendah MPC. Banyaknya tabungan dan asuransi jiwa menyebabkan fungsi konsumsi menurun. Sikap hemat ini dipengaruhi oleh pemilihan waktu tentang konsumsi masyarakat yang lebih penting, antara konsumsi waktu sekarang dengan waktu yang akan datang.

#### 2.2.3 Perubahan Gaji Pokok

Perubahan pendapatan yang diterima dari gaji disempurnakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1997 Tentang Penyempurnaan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Dari PP No. 15 tahun 1993( Himpunan Peraturan Pemda Kabupaten Ngawi,1998 ). Peraturan Pemerintah yang baru tersebut tentunya juga mempengaruhi jumlah gaji yang diterima tiap bulannya. Namun, jika dihubungkan dengan situasi perekonomian negara saat ini maka perubahan tersebut tidak begitu berarti. Keadaan tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II tetap mencari usaha sampingan di luar jam dinas.

Tabel 3.1 : Daftar Penyempurnaan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II Berdasarkan PP No. 6 Tahun 1997 (Rupiah)

GOLONGAN I					GOLONGAN II				
Masa Kerja Gol.	Ruang dan kenaikan gaji pokok				Masa kerja Gol.	Ruang dan kenaikan gaji pokok			
	A	B	C	D		A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	135.000								
1									
2	141.800								
3		151.100	157.100	1630.400					
4	148.800								
5		158.700	165.000	171.600					
6	156.300				0	182.900			
7		166.600	173.300	180.200	1	187.500			
8	164.100				2				
9		174.900	181.900	189.200	3	196.600	204.800	212.900	221.500
10	172.300				4				
11		183.700	191.000	198.700	5	206.700	215.000	223.600	232.500
12	180.900				6				
13		192.900	200.600	208.600	7	217.100	225.700	234.800	244.500
14	190.000				8				
15		202.500	210.600	219.000	9	227.900	237.000	246.500	256.400
16	199.500				10				
17		212.600	221.100	230.000	11	239.300	248.900	258.800	269.200
18	209.400				12				
19		223.300	232.200	241.500	13	251.300	261.300	271.800	282.700
20	219.900				14				
21		234.400	243.800	253.500	15	263.800	274.400	285.400	296.800
22	230.900				16				
23		246.100	256.000	266.200	17	277.000	288.100	299.600	311.600
24	242.400				18				
25		258.400	268.800	279.500	19	290.900	302.500	314.600	327.200
26	254.600				20				
27		271.400	282.200	293.500	21	305.400	317.600	330.400	343.600
					22				
					23	320.700	333.500	346.200	360.700
					24				
					25	336.700	350.200	364.200	378.800
					26				
					27	353.600	367.700	382.400	397.700
					28				
					29	371.300	386.100	401.500	417.600
					30				
					31	389.800	405.400	421.600	438.500
					32				
					33	409.300	425.700	442.700	460.400

Sumber : Bagian Kepegawaian Pemda Kabupaten Ngawi 1999

Gaji pokok adalah gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai yang tertera pada daftar gaji pokok. Besar kecilnya gaji pokok tidak terlepas daripada tinggi rendahnya golongan atau ruang maupun lamanya masa kerja. Pembagian golongan dan ruang disesuaikan dengan ijazah atau STTB dan diploma yang dimiliki

pada waktu melamar pekerjaan (Ahmad Ghufron dkk, 1991: 39). Apabila dilihat dari jumlah penerimaan gaji pokok yang diterima para Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan besarnya jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi tiap bulannya. Pemberian gaji pokok diatur dalam PP No. 15 Tahun 1985 yang diperbarui dengan PP No. 6 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan dari PP No. 15 tahun 1993. Kenaikan gaji di sini adalah kenaikan gaji pokok dari semua golongan, Sesuai dengan penelitian ini maka pedoman yang digunakan adalah daftar gaji untuk pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II. Daftar gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II dapat dilihat pada tabel 4.2.

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Perubahan pendapatan yang diterima sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi dari masing-masing keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II.
2. Ada perbedaan yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi antara pegawai negeri sipil golongan I dan pegawai negeri sipil golongan II.



### III. METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya metode penelitian yang dijadikan landasan untuk mendapatkan data dan merupakan sarana yang penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yaitu dengan mencari, menemukan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian.

#### 3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan atau disain penelitian observasi langsung kepada responden dan juga studi kepustakaan untuk menunjang keberhasilan penelitian ini. Masalah yang diambil adalah mengenai pengaruh perubahan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi dari keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Ngawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh yang diakibatkan dari pertambahan pendapatan yang diterima terhadap pola konsumsinya. Hipotesis yang dapat diambil sementara adalah bahwa memang ada pengaruh dari pendapatan yang diterima dengan pola konsumsi dari tiap-tiap keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II yang menjadi sampel.

#### 3.2 Responden Penelitian

Responden penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II yang berdomisili di wilayah Kabupaten Ngawi. Sampel yang diambil dari masing-masing pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II adalah masing-masing 15 orang jadi keseluruhan sampel adalah 30 orang. Pengambilan sampel ini berdasarkan pada pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II yang benar-benar bersedia dijadikan sampel. Metode pengambilan sampel adalah dengan cara random sampling yaitu memilih secara acak para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II yang bersedia dijadikan sampel. Pegawai negeri sipil golongan I dan

golongan II yang dijadikan sampel dalam satu keluarga adalah salah satu dari keseluruhan jumlah keluarga yang menjadi pegawai negeri.

Pendapatan yang akan dijadikan sumber data adalah pendapatan yang diterima dari gaji dan pendapatan dari usaha sampingan para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II tersebut. Pendapatan yang diterima itu nantinya akan mempengaruhi dalam mencari pengeluaran konsumsi dari masing-masing keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II. Jumlah tanggungan dalam hal ini juga termasuk keuangan dalam faktor yang nantinya juga akan mempengaruhi besarnya pengeluaran dari pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer yaitu yang berasal dari pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II yang tersebar di berbagai instansi dan dinas-dinas di kabupaten Ngawi. Instansi dan dinas-dinas tersebut antara lain Depdikbud, Dinas Kesehatan, kantor kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum, kantor Kecamatan dan lingkungan kantor Pemda atau bagian-bagian dalam kantor Pemda. Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder untuk menunjang kebenaran data dari penelitian ini.

### 3.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Sederhana untuk mencari pengaruh dari perubahan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II. Pengeluaran konsumsi keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C = C_0 + bY_d \quad (\text{Soediyono R., 1985: 14})$$

Keterangan :

C = besarnya konsumsi

C<sub>0</sub> = tingkat konsumsi pada saat disposable income

$b$  = MPC ( Marginal Propensity to Consume )

$Y_d$  = Disposable Income

Nilai  $C_o$  dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$C_o = X - b Y$$

Keterangan :

$X$  = rata-rata nilai  $X$ ,  $X$  adalah besarnya tingkat konsumsi dari sampel

$Y$  = rata-rata nilai  $Y$ ,  $Y$  adalah besarnya tingkat pendapatan dari sampel

Nilai MPC dapat dicari dengan menggunakan rumus :

$$b = MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

Keterangan :

$\Delta C$  = besarnya perubahan konsumsi

$\Delta Y$  = besarnya perubahan pendapatan

Berdasarkan rumus dasar tersebut maka untuk mengetahui pengaruh perubahan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi keluarga pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II digunakan rumus sebagai berikut :

### I. Golongan I

$$C_1 = C_o + bY_{d1}$$

Keterangan :

$C_1$  = besarnya konsumsi pegawai negeri sipil golongan I

$C_o$  = tingkat konsumsi pada saat disposable income

$b$  = MPC ( Marginal Propensity to Consume )

$Y_{d1}$  = Disposable Income pegawai negeri sipil golongan I

### II. Golongan II

$$C_2 = C_o + bY_{d2}$$

Keterangan :

$C$  = besarnya konsumsi pegawai negeri sipil golongan II

- Co = tingkat konsumsi pada saat disposable income  
 b = MPC ( Marginal Propensity to Consume )  
 Yd = Disposable Income pegawai negeri sipil golongan II

Test terhadap parameter b dan Co dapat dicari dengan rumus :

$$t = \frac{b}{S_b} \qquad t = \frac{C_o}{S_{C_o}}$$

( J. Supranto, 1988: 230 )

Keterangan :

$$S_b = \sqrt{\frac{\sigma^2}{\sum Yd^2}} \qquad S_{C_o} = \sqrt{\frac{\sum Yd^2}{n \sum Yd}}$$

$$\sigma^2 = \frac{ei^2}{n-2}$$

( Damodar Gujarati, 1986: 47 )

Perumusan Hipotesa untuk parameter b :

Ho : B = 0 ; Ho ditolak jika  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $t_h \leq -t_\alpha$

Hi : B ≠ 0 ; Ho diterima jika  $-t_\alpha \leq t_h \leq t_\alpha$  level of signifikan (5%) dengan DF (n-2)

Perumusan Hipotesa untuk parameter Co =:

Ho : B = 0 ; Ho ditolak jika  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $t_h \leq -t_\alpha$

Hi : B ≠ 0 ; Ho diterima jika  $-t_\alpha \leq t_h \leq t_\alpha$  level of signifikan (5%) dengan DF (n-2)

Nilai koefisien korelasi (=r) dari fungsi konsumsi tersebut dengan rumus :

$$r = \frac{n \sum Yd \cdot X - \sum Yd \cdot \sum X}{\sqrt{n \sum Yd^2 - (\sum Yd)^2} \cdot \sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2}}$$

Test terhadap nilai r dari fungsi konsumsi dapat digunakan rumus t-test yaitu :

$$t = \frac{r}{\sqrt{(n-1)}}$$

Perumusan Hipotesa :

Perumusan Hipotesa untuk parameter b :

Ho : r = 0 ; Ho ditolak jika  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $t_h \leq -t_\alpha$  :

Hi :  $r \neq 0$  ; Ho diterima jika  $-t_{\alpha} \leq t_h \leq t_{\alpha}$  level of signifikan (5%) dengan DF (n-2)

### 3.5 Definisi Operasional

Analisa pokok persoalan bertitik tolak pada beberapa konsep dasar dan pengukuran variabel yang secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Pengaruh adanya daya yang timbul dari suatu perubahan yang menyebabkan sektor lain terkena akibat dari perubahan tersebut.
2. Pendapatan yang dimaksud terdiri dari pendapatan pokok yang diterima dari gaji tiap bulannya dan pendapatan sampingan dari usaha sampingan selain menjadi pegawai negeri.
3. Pengeluaran konsumsi adalah pengeluaran untuk kebutuhan pokok ( pangan, sandang, papan ) dan pengeluaran untuk kebutuhan non pokok ( rekreasi, nonton, sumbangan sosial ).
4. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa jangka pendek. Faktor pendapatan yang siap dibelanjakan dianggap sebagai satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsumsi dari masing-masing sampel.
5. Pola konsumsi adalah proporsi konsumsi atau perbandingan antara kebutuhan pokok dengan kebutuhan tambahan.

## IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Objek yang Diteliti

Penelitian ini mengambil tempat di kantor-kantor/suku dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II kabupaten Ngawi dengan obyek penelitian adalah para Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I dan Golongan II. Lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Ngawi sendiri terdiri dari berbagai dinas dan bagian. Dinas-dinas tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Depdikbud Kecamatan, Kecamatan dan lain-lain. Bagian-bagian tersebut antara lain adalah bagian hukum, kepegawaian, Pemerintahan Desa dan lain-lain. Penelitian ini mengambil 5 tempat di kantor-kantor atau suku dinas di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Ngawi tersebut. Berdasarkan data terakhir yang ada pada bagian kepegawaian pemerintah daerah tingkat II kabupaten Ngawi tahun 1999 jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Ngawi adalah 3022 pegawai yang tersebar di berbagai instansi atau dinas dan bagian-bagiannya. Bab terdahulu telah menjelaskan bahwa pegawai negeri sipil terdiri dari berbagai golongan dan masing-masing golongan memiliki tingkatan gaji yang berbeda. Penelitian menitikberatkan pada pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II dengan pertimbangan golongan I dan golongan II adalah termasuk golongan pegawai negeri sipil yang mempunyai penghasilan menengah ke bawah., tetapi mempunyai hasrat konsumsi yang tinggi. Faktor yang membedakan antara pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II adalah dilihat dari tingkat pendidikan. Pegawai negeri sipil daerah golongan I mayoritas memiliki STTB Sekolah Dasar (SD), SMP dan yang sederajat. Pegawai negeri sipil daerah golongan II adalah golongan pegawai negeri sipil daerah yang memiliki STTB/ijasah SMA dan yang sederajat dan Diploma.

Pegawai negeri sipil daerah di kabupaten Ngawi khususnya pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II pada umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah jika dilihat dari pola hidup keseharian. Faktor tingkat

pendidikan sangat mempengaruhi pola hidup dan selera individu dalam memenuhi kebutuhan tiap harinya. Pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II memiliki pola hidup yang sederhana dalam mengalokasikan penghasilan yang diterima tiap bulan. Faktor keadaan lingkungan dan geografis juga dapat berperan dalam mempengaruhi pola hidup dari suatu masyarakat. Kabupaten Ngawi merupakan kota yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Jumlah pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II masih tinggi jumlahnya dibanding golongan III dan golongan IV. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikannya masih dikatakan menenah ke bawah. Keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah di kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Ngawi dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 : Daftar Pegawai Negeri Sipil Daerah Per Golongan Bulan Juli 1999, di Ngawi

No	Golongan PNS	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	I	235	10	245
2.	II	754	801	1555
3.	III	770	331	1101
4.	IV	21	-	21
Jumlah				3022

*Sumber : bagian Kepegawaian Kabupaten Ngawi, 1999*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan II memiliki jumlah terbesar dari keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah yang ada di kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II kabupaten Ngawi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada memiliki persentase 4,5 % dari keseluruhan jumlah penduduk kabupaten Ngawi. Jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya maka jumlah pegawai negeri sipil ini masih relatif kecil. Sedikitnya jumlah Pegawai Negeri Sipil tersebut disebabkan karena berbagai faktor antara lain :

a. Persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil yang cukup sulit, misalnya :

1. harus berpendidikan minimal tamat SMP, bahkan sekarang ini minimal harus SMA
  2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
  3. Bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawab.
- b. Tingkat upah atau gaji yang belum memenuhi standart yang sesuai dengan kebutuhan.

Dengan adanya persyaratan tersebut, maka bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat (a) tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan bagi yang memenuhi syarat (a) belum tentu bersedia menjadi Pegawai Negeri Sipil karena tingkat upah atau gaji yang belum memadai atau krena lebih tertarik pada jenis pekerjaan lainnya yang dapat memberikan balas jasa yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

#### **4.1.1 Pendapatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II.**

Pendapatan pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II yang dimaksudkan adalah pendapatan pokok yang diterima dari gaji pokok yang diterima tiap bulannya yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan sosial dan jaminan sosial. Pendapatan sampingan adalah pendapatan yang diterima dari pekerjaan sampingannya. Total pendapatan pokok yang diterimanya tiap bulan disebut sebagai **Disposable Income** yaitu pendapatan yang siap dikonsumsi setelah dikurangi pajak. Disposable income tau pendapatan yang siap dibelanjakan oleh pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II adalah gaji yang diterima setiap bulan dan setelah dikurangi iuran Taspen (Ahmad Ghufroon dkk, 1991: 50). Pendapatan pokok yang diterima tiap bulannya diasumsikan tetap selama belum ada peraturan yang merubah tentang jumlah penerimaan gaji pokok. Penelitian ini mengambil kurun waktu selama 3 bulan dan selama itu tidak ada peraturan yang berkaitan dengan perubahan gaji pokok baik dari Pegawai negeri sipil golongan I dan Golongan II.

Berdasarkan PP No. 3 Tahun 1980 pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II di bagi dalam berbagai ruang untuk membedakan kemampuan tingkat pendidikan yang dimiliki saat melamar pekerjaan (Soenardi Dwidjoesastro dkk,1987: 5). Tabel daftar penyempurnaan gaji pokok berdasarkan PP No. 6 tahun 1997 memperlihatkan pembagian gaji berdasarkan masa kerja (kolom 1), golongan dan ruang. Keterangan dari tabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Golongan I, ruang A ( IA) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar. (kolom 2)
2. Golongan I, ruang B ( IB) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau yang sederajat. (kolom 3)
3. Golongan I, ruang A ( IC) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar SMTP dan telah lama bekerja sehingga naik pangkat. (kolom 4)
4. Golongan I, ruang A ( ID) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar SMTP dan mempunyai sertifikat ketrampilan atau kursus yang diikuti dalam rangka kenaikan pangkat. (kolom 5)
5. Golongan II, ruang A ( IIA) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas dan yang sederajat atau memiliki akta I. (kolom 6)
6. Golongan II, ruang A ( IIB) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki Ijasah Diploma III, Sarjana Muda atau yang sederajat dan memiliki akta II. (kolom 8)
7. Golongan II, ruang A ( IIC) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki ijasah Diploma III dan sarjana nuda dan yang mamiliki Akta IV. (kolom 9)
8. Golongan II, ruang D ( IID ) adalah pegawai negeri sipil yang telah mengalami kenaikan pangkat dari IIC melalui berbagai latihan dan kursus yang berkaitan dengan bidang yang ditekuni.(kolom 10)

Pembedaan golongan, ruang, dan masa kerja ini untuk memudahkan dalam hal pemberian gaji pokok kepada tiap-tiap pegawai negeri sipil. Pembedaan tersebut juga berarti menghargai pegawai negerisipil yang masa bhaktinya lebih banyak dan

menghargai pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi yang bagus dalam pekerjaannya.

Tabel 4.2 Daftar Pendapatan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II di Kabupaten Ngawi Tahun 2000 ( Rupiah )

Sampel ( n )	Golongan I		Sampel ( n )	Golongan II	
	Gaji pokok	Take Home Pay		Gaji Pokok	Take Home Pay
1.	181,900	502,400	1.	239,300	646,400
2.	198,700	600,000	2.	274,400	686,200
3.	258,400	522,100	3.	244,400	677,700
4.	192,900	600,000	4.	282,700	750,000
5.	173,300	522,100	5.	256,400	761,200
6.	230,000	500,850	6.	269,800	607,800
7.	165,000	485,100	7.	237,000	596,800
8.	232,200	700,000	8.	234,800	662,400
9.	208,600	675,000	9.	196,900	700,000
10.	256,600	533,800	10.	212,900	850,000
11.	266,200	562,000	11.	460,400	430,000
12.	246,100	530,100	12.	367,700	625,000
13.	180,200	522,100	13.	382,400	522,100
14.	189,200	500,850	14.	217,100	800,000
15.	202,500	502,400	15.	401,500	900,000

Sumber: Data didapat dari sampel

Keterangan :

Take Home Pay atau gaji kotor adalah gaji yang diterima tiap bulan setelah ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan dikurangi iuran taspen ( Disposable Income ).

Tabel 4.3 Perbandingan Pengeluaran Pokok dan Non Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II di Kabupaten Ngawi Tahun 2000 ( Rupiah )

Sampel ( a )	Golongan I		Sampel ( n )	Golongan II	
	Pengeluaran Pokok	Pengeluaran Non Pokok		Pengeluaran Pokok	Pengeluara n Non Pokok
1.	300,000	170,000	1.	300,000	200,000
2.	300,000	142,500	2.	500,000	275,000
3.	250,000	180,000	3.	600,000	240,000
4.	200,000	160,000	4.	300,000	112,500
5.	250,000	120,000	5.	550,000	310,000
6.	400,000	215,000	6.	250,000	310,000
7.	320,000	277,500	7.	500,000	132,500
8.	360,000	215,000	8.	450,000	247,500
9.	500,000	325,000	9.	350,000	525,000
10.	350,000	105,000	10.	400,000	167,500
11.	300,000	135,000	11.	300,000	97,500
12.	250,000	260,000	12.	350,000	142,500
13.	325,000	176,500	13.	550,000	242,500
14.	200,000	200,000	14.	525,000	115,000
15.	400,000	260,000	15.	500,000	282,500

Sumber: Data didapat dari sampel

Keterangan :

Pengeluaran Non pokok (sekunder) yang dimaksud adalah pengeluaran non pokok rata-rata yang diambil dari pengeluaran non pokok periode pertama penelitian ditambah pengeluaran non pokok periode kedua penelitian dibagi dengan angka 2 ( dua ).

Perbandingan penggunaan pengeluaran pokok dengan pengeluaran non pokok untuk pegawai negeri sipil daerah golongan I adalah :

1. Berbanding 50 dengan 40 adalah sebanyak 6 orang sampel artinya pendapatan yang diterima tiap bulan dialokasikan 50% untuk pengeluaran pokok dan 40% untuk pengeluaran non pokok.
2. Berbanding 60 dengan 40 adalah sebanyak 4 orang sampel sampel artinya pendapatan yang diterima tiap bulan dialokasikan 60% untuk pengeluaran pokok dan 40% untuk pengeluaran non pokok.
3. Berbanding 70 dengan 30 sebanyak 3 orang sampel sampel artinya pendapatan yang diterima tiap bulan dialokasikan 70% untuk pengeluaran pokok dan 30% untuk pengeluaran non pokok.
4. Berbanding 80 dengan 20 adalah sebanyak 2 orang sampel sampel artinya pendapatan yang diterima tiap bulan dialokasikan 80% untuk pengeluaran pokok dan 20% untuk pengeluaran non pokok.

Perbandingan penggunaan pengeluaran pokok dengan pengeluaran non pokok untuk pegawai negeri sipil daerah golongan II adalah :

1. Berbanding 50 dengan 40 adalah sebanyak 7 orang sampel artinya pendapatan yang diterima tiap bulan dialokasikan 50% untuk pengeluaran pokok dan 40% untuk pengeluaran non pokok.
2. Berbanding 60 dengan 40 adalah sebanyak 5 orang sampel sampel artinya pendapatan yang diterima tiap bulan dialokasikan 60% untuk pengeluaran pokok dan 40% untuk pengeluaran non pokok.
3. Berbanding 70 dengan 30 sebanyak 3 orang sampel sampel artinya pendapatan yang diterima tiap bulan dialokasikan 70% untuk pengeluaran pokok dan 30% untuk pengeluaran non pokok.
4. Berbanding 80 dengan 20 adalah sebanyak 2 orang sampel sampel artinya pendapatan yang diterima tiap bulan dialokasikan 80% untuk pengeluaran pokok dan 20% untuk pengeluaran non pokok.

Di samping gaji pokok kepada para Pegawai Negeri Sipil juga diberikan berbagai macam bentuk tunjangan yang berkenaan dengan keluarga , jabatan dan

tunjangan lainnya yang diatur menurut PP No. 7 Tahun 1977 jo. PP No. 15 Tahun 1985. Berbagai macam bentuk tunjangan itu antara lain :

1. Tunjangan Keluarga

Yaitu tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah beristri atau bersuami diberikan sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami istri kedua-duanya berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan ini hanya diberikan kepada salah satu dari mereka yaitu yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak kandung atau anak angkat yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun, belum pernah menikah dan masih sekolah. Tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap anak. Tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) anak angkat.

2. Tunjangan jabatan

Yaitu tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatab struktural penting lainnya yang mengakibatkan para pejabat tersebut memikul tanggung jawab yang cukup berat, misalnya :

1. Tunjangan jabatan struktural
2. Tunjangan jabatan fungsional
3. Tunjangan jabatan pembulatan

3. Tunjangan Lain-lain yang berupa :

1. Tunjangan kesehatan
2. Tunjangan intensif
3. Tunjangan khusus pajak
4. Tunjangan perbaikan penghasilan
5. Tunjangan beras.

Jumlah tanggungan adalah semua orang baik istri, anak, adik famili, orang tua Pegawai Negeri tersebut dan pembantu rumah tangga yang hidupnya tergantung atau menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Berdasarkan sampel yang telah penulis kumpulkan, maka dapat dilihat gambaran rata-rata jumlah tanggungan yang ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil, seperti terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.4 : Jumlah Tanggungan, Status tanggungan dan Rata-rata Tanggungan Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I dan Golongan II di Kabupaten Ngawi Tahun 2000

Golongan	Jumlah	Jumlah dan Status Tanggungan			Rata-rata
		Bekerja	Tidak bekerja dan tidak sekolah	Sekolah	
I	15	10	25	32	4
II	15	8	32	22	4

Sumber : data yang didapat dari sampel

Rata-rata jumlah tanggungan dihitung dengan jumlah tanggungan ( tidak bekerja, tidak sekolah dan yang masih sekolah dibagi dengan jumlah sampel, sedang tanggungan yang bekerja dianggap telah mampu membiayai hidupnya, jadi dapat dianggap lepas dari tanggungan pegawai negeri tersebut yang bersangkutan.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah rata-rata tanggungan dari pegawai negeri yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sama yaitu 4 ( empat ) orang. Jumlah tanggungan tersebut apabila kita anggap yang seorang suami atau istri dan yang lainnya adalah anak yang berumur di bawah 25 tahun atau masih sekolah berarti hanya mendatangkan tambahan pendapatan sebesar 5% dari suami atau istri ( 5% dari gaji pokok ) dan 2% dari ketiga anaknya ( 2% dari gaji pokok ). Jika jumlah gaji pokok yang diperolehnya juga relatif kecil maka jumlah tambahan pendapatan ini tetap merupakan beban tanggungan tiap-tiap pegawai negeri golongan I dan golongan II yang bersangkutan. Peranan status tanggungan yang sudah bekerja dalam

rangka membantu dalam pemenuhan kebutuhan juga tidak dapat dijadikan acuan karena tidak semua pegawai negeri memiliki status tanggungan dalam keluarganya.

Pemerintah selalu berusaha memberikan peningkatan kesejahteraan yang layak kepada para pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II dan kepada semua pegawai negeri pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kenaikan gaji tersebut. Peraturan pemerintah itu diantaranya adalah PP No. 15 tahun 1993 yang merupakan penyempurnaan dari PP No. 15 Tahun 1985 dan yang terakhir adalah PP No. 6 tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan gaji pokok dari PP No. 16 Tahun 1993. Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I dan Golongan II untuk menutupi kebutuhan tiap bulannya selain mengandalkan dari gaji pokok yang diterimanya juga berusaha mencari pekerjaan tambahan yang dilakukan diluar jam dinas, karena masih banyak waktu tersisa setelah melakukan pekerjaan pokoknya. Keadaan perekonomian bangsa yang sedang mengalami kemunduran ditambah harga barang kebutuhan mengalami kenaikan tidak sebanding dengan kenaikan gaji yang diterima juga merupakan faktor yang mendorong pegawai negeri sipil mencari tambahan penghasilan. Berdasarkan 30 sampel yang diperoleh semuanya memiliki pekerjaan sampingan sebagai berikut :

1. di bidang pertanian : 18 orang ( 60% dari jumlah sampel )
  - a. Pegawai negeri sipil golongan I sebanyak: 12 orang
  - b. Pegawai negeri sipil golongan II sebanyak: 6 orang
2. di bidang jasa : 4 orang ( 13,33 dari jumlah sampel )
  - a. Pegawai negeri sipil golongan I sebanyak: 1 orang
  - b. Pegawai negeri sipil golongan II sebanyak: 3 orang
3. di bidang Perdagangan : 8 orang ( 26,7 dari jumlah sampel )
  - a. Pegawai negeri sipil golongan I sebanyak: 2 orang
  - b. Pegawai negeri sipil golongan II sebanyak: 6 orang

Pekerjaan tambahan yang terbesar adalah dari bidang pertanian karena sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten Ngawi yang merupakan tanah agraris. Pekerjaan sampingan jenis jasa adalah mereka yang bekerja dengan menjual jasa seperti

makelar, guru les privat, penjahit, sebagai ibu atau bapak kost dari rumah yang disewakan. Pekerjaan sampingan jenis perdagangan adalah pegawai negeri sipil yang memiliki usaha di bidang perdagangan seperti warung, toko dan sebagainya.

#### 4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II

Pola konsumsi masyarakat kelompok pendapatan lapis bawah didominasi oleh konsumsi kebutuhan pokok, maka pola konsumsi masyarakat kelompok pendapatan lapis atas cenderung ke konsumsi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tertier. Pola konsumsi suatu masyarakat dapat dilihat berdasarkan alokasi penggunaannya (Harijono, 1998:5). Menurut BPS (1998), alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makan dan pengeluaran untuk bukan makan. Daftar rincian kedua kelompok pengeluaran konsumsi tersebut tercermin pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Daftar Alokasi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

A. MAKANAN	B. BUKAN MAKANAN
1. Padi-padian	1. Perumahan dan bahan bakar
2. Umbi-umbian	2. Aneka barang dan jasa
3. Ikan	a. bahan perawatan badan (sabun, pasta gigi, parfum dan sebagainya).
4. Daging	b. Bacaan (koran, majalah dan buku)
5. Telur dan susu	c. Komunikasi
6. Sayur-sayuran	d. Kendaraan bermotor
7. Kacang-kacangan	e. Transportasi
8. Buah-buahan	f. Pembantu dan sopir
9. Minyak dan lemak	3. Biaya pendidikan
10. Bahan minuman	4. Biaya kesehatan
11. Bumbu-bumbuan	5. Pakaian, alas kaki, tutup kepala
12. Bahan pangan lain	6. Barang-barang tahan lama
13. Makanan jadi	7. Pajak dan premi asuransi
14. Minuman beralkohol	8. Keperluan pesta dan upacara
15. Tembakau dan sirih	

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 1998

Dumairy (1997) mengungkapkan bahwa lebih dari separoh pengeluaran konsumsi orang Indonesia dialokasikan untuk makanan. Proporsinya adalah 56,86 %



pada tahun 1993, naik (memburuk) menjadi 61,69 % pada tahun 1994 dari seluruh pengeluaran konsumsi. Bagian terbesar dari pengeluaran konsumsi adalah dibelanjakan untuk jenis padi-padian, yaitu sekitar 25 % dari pengeluaran konsumsi makanan atau 15,43 % dari jumlah seluruh pengeluaran. Sementara pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terutama untuk perumahan dan bahan bakar, proporsinya sekitar 44 % dari seluruh pengeluaran kelompok ini, atau bewarti 17 % dari jumlah seluruh pengeluaran ( Harijono dan Zainuri, 1998: 6).

Pengeluaran konsumsi perbulan Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I dan Golongan II terdiri dari berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel menunjukkan pengeluaran pendapatan tiap bulan dibagi menjadi dua jenis pengeluaran yaitu :

1. Pengeluaran Kebutuhan pokok tiap bulan yang terdiri dari :
  1. Pengeluaran untuk pangan  
yaitu pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makam seperti membeli beras, lauk pauk, sayur mayur dan sebagainya.
  2. Pengeluaran untuk sandang  
yaitu pengeluaran untuk membeli pakaian dan yang sejenisnya.
  3. Pengeluaran untuk perumahan  
yaitu pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan rumah, sewa air minum, bayar listrik, bayar telepon.
  4. Pengeluaran untuk kesukaan  
yaitu pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kesukaan atau hobi yang harus dikeluarkan tiap bulan seperti misalnya membeli rokok, surat kabar, majalah, alat-alat rumah tangga, mainan anak-anak, biaya memancing.
2. Pengeluaran non pokok yang terdiri dari :
  1. Pengeluaran untuk pendidikan  
yaitu pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membeli buku-buku, seragam sekolah, SPP, uang saku, uang transport dan uang indekost.

makelar, guru les privat, penjahit, sebagai ibu atau bapak kost dari rumah yang disewakan. Pekerjaan sampingan jenis perdagangan adalah pegawai negeri sipil yang memiliki usaha di bidang perdagangan seperti warung, toko dan sebagainya.

#### 4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan I dan Golongan II

Pola konsumsi masyarakat kelompok pendapatan lapis bawah didominasi oleh konsumsi kebutuhan pokok, maka pola konsumsi masyarakat kelompok pendapatan lapis atas cenderung ke konsumsi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan tertier. Pola konsumsi suatu masyarakat dapat dilihat berdasarkan alokasi penggunaannya (Harijono, 1998:5). Menurut BPS (1998), alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makan dan pengeluaran untuk bukan makan. Daftar rincian kedua kelompok pengeluaran konsumsi tersebut tercermin pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Daftar Alokasi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat

A. MAKANAN	B. BUKAN MAKANAN
1. Padi-padian	1. Perumahan dan bahan bakar
2. Umbi-umbian	2. Aneka barang dan jasa
3. Ikan	a. bahan perawatan badan (sabun, pasta gigi, parfum dan sebagainya).
4. Daging	b. Bacaan (koran, majalah dan buku)
5. Telur dan susu	c. Komunikasi
6. Sayur-sayuran	d. Kendaraan bermotor
7. Kacang-kacangan	e. Transportasi
8. Buah-buahan	f. Pembantu dan sopir
9. Minak dan lemak	3. Biaya pendidikan
10. Bahan minuman	4. Biaya kesehatan
11. Bumbu-bumbuan	5. Pakaian, alas kaki, tutup kepala
12. Bahan pangan lain	6. Barang-barang tahan lama
13. Makanan jadi	7. Pajak dan premi asuransi
14. Minuman beralkohol	8. Keperluan pesta dan upacara
15. Tembakau dan sirih	

Sumber : Biro Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 1998

Dumairy (1997) mengungkapkan bahwa lebih dari separoh pengeluaran konsumsi orang Indonesia dialokasikan untuk makanan. Proporsinya adalah 56,86 %

pada tahun 1993, naik (memburuk) menjadi 61,69 % pada tahun 1994 dari seluruh pengeluaran konsumsi. Bagian terbesar dari pengeluaran konsumsi adalah dibelanjakan untuk jenis padi-padian, yaitu sekitar 25 % dari pengeluaran konsumsi makanan atau 15,43 % dari jumlah seluruh pengeluaran. Sementara pengeluaran untuk kelompok bukan makanan terutama untuk perumahan dan bahan bakar, proporsinya sekitar 44 % dari seluruh pengeluaran kelompok ini, atau bewarti 17 % dari jumlah seluruh pengeluaran ( Harijono dan Zainuri, 1998: 6).

Pengeluaran konsumsi perbulan Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I dan Golongan II terdiri dari berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan data yang diperoleh dari sampel menunjukkan pengeluaran pendapatan tiap bulan dibagi menjadi dua jenis pengeluaran yaitu :

1. Pengeluaran Kebutuhan pokok tiap bulan yang terdiri dari :
  1. Pengeluaran untuk pangan  
yaitu pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makam seperti membeli beras, lauk pauk, sayur mayur dan sebagainya.
  2. Pengeluaran untuk sandang  
yaitu pengeluaran untuk membeli pakaian dan yang sejenisnya.
  3. Pengeluaran untuk perumahan  
yaitu pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan rumah, sewa air minum, bayar listrik, bayar telepon.
  4. Pengeluaran untuk kesukaan  
yaitu pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi kesukaan atau hobi yang harus dikeluarkan tiap bulan seperti misalnya membeli rokok, surat kabar, majalah, alat-alat rumah tangga, mainan anak-anak, biaya memancing.
2. Pengeluaran non pokok yang terdiri dari :
  1. Pengeluaran untuk pendidikan  
yaitu pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membeli buku-buku, seragam sekolah, SPP, uang saku, uang transport dan uang indekost.

## 2. Pengeluaran untuk kesehatan

yaitu pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk membeli obat dan yang berhubungan perbaikan kesehatan keluarga.

## 3. Pengeluaran untuk rekreasi

yaitu untuk pergi darmawisata bersama keluarga, nonton bioskop dan lain sebagainya.

## 4. Pengeluaran untuk sosial

misalnya untuk sumbangan pernikahan, kematian, sumbangab untuk perbaikan kampung dan amal jariyah.

## 5. Pengeluaran untuk bantuan keluarga

Misalnya diberikan kepada orang tua dan adik atau saudara yang tinggal satu rumah dan memang perlu dibantu.

### 4.2 Hasil Analisis data

Penelitian yang telah dilaksanakan pada keluarga Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I dan Golongan II di Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa perubahan pendapatan yang diterima oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I dan Golongan II sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsinya. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pendapatan yang diterima untuk tiap-tiap Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I adalah Rp. 301.606,67 dan untuk Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan II adalah sebesar Rp. 339.220,00.

Rata-rata pendapatan tambahan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I adalah sebesar Rp. 114.230,00. Nilai ini diperoleh dari tabel lampiran 1 yaitu pendapatan tambahan periode pertama penelitian ditambah pendapatan tambahan periode terakhir penelitian dibagi 2 (dua). Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan II memiliki rata-rata pendapatan sampingan sebesar Rp 99.783,50 (perhitungan sama dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan I pada lampiran 2). Asumsinya bahwa rata-rata pegawai negeri sipil golongan I yang mempunyai pekerjaan sampingan di bidang pertanian mempunyai lahan yang lebih luas

dibanding pegawai negeri sipil golongan II. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbandingan rata-rata pendapatan tambahan yang diterima Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I adalah lebih besar dari rata-rata pendapatan tambahan yang diterima Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan II. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasrat untuk mendapatkan pendapatan sampingan dari pegawai negeri sipil golongan I lebih besar dibandingkan pegawai negeri sipil golongan II.

Hasil perhitungan pada lampiran 3 dan 4 menunjukkan tentang jumlah pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I dan Golongan II. Rata-rata pengeluaran konsumsi tiap bulan dari keluarga Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I adalah sebesar Rp. 429.433,33 (perhitungan didapat dari pengeluaran konsumsi periode pertama penelitian ditambah pengeluaran konsumsi periode akhir penelitian dibagi angka 2 pada lampiran 3). Apabila dinyatakan dalam prosentase maka jumlah pengeluaran pokok untuk Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I adalah sebesar 65% dari keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan tiap bulannya. Pengeluaran pokok tersebut terbagi menjadi 60% untuk kebutuhan makan, 14% untuk kebutuhan perumahan dan sisanya 26% untuk kebutuhan sandang dan kebutuhan tak terduga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tiap bulannya.

Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan II mempunyai rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 637.666,66 tiap bulannya ( perhitungan sama dengan Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I pada lampiran 4 ). Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan II memiliki jumlah pengeluaran pokok sebesar 71% dari keseluruhan jumlah pengeluaran tiap bulannya. Pengeluaran pokok tersebut terbagi menjadi 50% untuk kebutuhan makan, 20% untuk kebutuhan perumahan dan 30% untuk kebutuhan sandang serta kebutuhan tak terduga yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tiap bulan. Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan II sebagian konsumsinya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan non pokok yang jumlahnya relatif besar dibandingkan Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I.

Pengeluaran konsumsi pegawai negeri sipil golongan I dinyatakan sebagai  $C1 = Co1 + bYd1$ . Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai  $Co$  adalah sebesar Rp. 1227,33 dan nilai  $b$  sebesar 0,71 sehingga diketahui pengeluaran konsumsi golongan I adalah sebesar:

$$C = 1227,33 + 0,71Yd$$

Perhitungan pada lampiran menunjukkan bahwa nilai t-hitung adalah sebesar 4,37 sedang nilai t-tabel adalah sebesar 2,160 sehingga  $4,37 \geq 2,160$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa pengeluaran konsumsi dari pegawai negeri sipil golongan I adalah signifikan. Pengaruh dari perubahan pendapatan dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $r$ ). Nilai  $r$  adalah sebesar 27,58 dan nilai  $r$  setelah dibuktikan dengan t-hitung adalah sebesar 103,19 sehingga  $103,19 \geq 2,160$  hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat antara pendapatan yang diterima dengan pengeluaran konsumsi dari masing-masing keluarga pegawai negeri sipil golongan I yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Pengeluaran konsumsi pegawai negeri sipil golongan II dinyatakan sebagai  $C2 = Co2 + bYd2$ . Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai  $Co$  adalah sebesar Rp. 8990,66 dan nilai  $b$  sebesar 0,65 sehingga diketahui pengeluaran konsumsi golongan I adalah sebesar:

$$C = 8990,66 + 0,65Yd$$

Perhitungan pada lampiran menunjukkan bahwa nilai t-hitung adalah sebesar 6,66 sedang nilai t-tabel adalah sebesar 2,160 sehingga  $6,66 \geq 2,160$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa pengeluaran konsumsi dari pegawai negeri sipil golongan II adalah signifikan. Pengaruh dari perubahan pendapatan dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $r$ ). Nilai  $r$  adalah sebesar 59,57 dan nilai  $r$  setelah dibuktikan dengan t-hitung adalah sebesar 222,910 sehingga  $222,910 \geq 2,160$  hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang kuat antara pendapatan yang diterima dengan pengeluaran konsumsi dari masing-masing keluarga pegawai negeri sipil golongan II yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

#### 4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan pendapatan yang diterima oleh pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsinya. Pengeluaran konsumsi dari pegawai negeri sipil daerah golongan I adalah 63,25% dialokasikan untuk kebutuhan pokok dan 37,5% dialokasikan untuk kebutuhan tambahan atau sampingan ( perhitungan diambil dari periode pertama ditambah periode kedua dibagi dengan angka 2 ). Pegawai negeri sipil daerah golongan II mempunyai pengeluaran konsumsi 58% digunakan untuk kebutuhan konsumsi pokok dan 42% digunakan untuk kebutuhan non pokok. Pengeluaran untuk kebutuhan pokok bagi keluarga pegawai negeri sipil daerah golongan I lebih besar daripada pegawai negeri sipil daerah golongan II, namun pengeluaran kebutuhan tambahan pegawai negeri sipil daerah golongan I lebih kecil dibandingkan pegawai negeri sipil golongan II karena pegawai negeri sipil daerah golongan II lebih banyak mengeluarkan pendapatannya untuk kebutuhan pendidikan, hiburan dan sebagainya. Faktor tingkat pendidikan sangat mempengaruhi cara atau gaya hidup dari masing-masing pegawai negeri sipil daerah. Bagi pegawai negeri sipil golongan II pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga cenderung berfikir mengkonsumsi barang dan jasa yang mempunyai nilai tinggi demi menjaga prestise.

Pengeluaran konsumsi pegawai negeri sipil daerah golongan I berdasarkan analisis data yang didapat menunjukkan  $C = 1227,33 + 0,70Yd$ . Pengeluaran konsumsi tersebut mengandung arti bahwa setiap ada penambahan pendapatan maka 70% digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan selebihnya yaitu 30% digunakan untuk sektor tabungan dan kebutuhan tak terduga lainnya. Pengeluaran konsumsi pegawai negeri sipil daerah golongan II adalah sebesar  $C = 8990,66 + 0,65Yd$ , maka setiap ada penambahan pendapatan 65% digunakan untuk kebutuhan konsumsi dan 35% digunakan untuk sektor tabungan dan kebutuhan tak terduga lainnya. Tingkat penghasilan pegawai negeri sipil daerah golongan I lebih kecil daripada pegawai negeri sipil daerah golongan II. Keadaan ini menunjukkan bahwa yang

mempengaruhi besar kecilnya tingkat konsumsi ( $= C$ ) pada tingkat penghasilan yang siap dikonsumsi oleh masing-masing keluarga ( $Y_d$ ) adalah kebiasaan konsumsi yang dilakukan setiap hari yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya.

Perbedaan rata-rata pendapatan sampingan yang diterima tiap bulan dari pegawai negeri sipil golongan I dan golongan II menunjukkan bahwa hasrat untuk mencari penghasilan tambahan dari masing-masing pegawai negeri sipil adalah berbeda. Rata-rata pendapatan sampingan yang diterima oleh pegawai negeri sipil golongan I adalah lebih besar dari golongan II. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hasrat untuk mencari pendapatan sampingan pegawai negeri sipil golongan I lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil golongan II. Faktor yang mempengaruhi adalah gaji yang diterima tiap bulan dari pegawai negeri sipil golongan I lebih rendah dari pegawai negeri sipil golongan II. Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi adalah perbedaan waktu luang yang dimiliki oleh tiap-tiap pegawai negeri sipil.

Rata-rata pendapatan yang diterima tiap bulan baik dari gaji pokok maupun dari usaha sampingan adalah sebesar Rp. 301.666,67 untuk pegawai negeri sipil golongan I dan Rp. 339.220,00 untuk pegawai negeri sipil golongan II yang berarti rata-rata per hari adalah sekitar Rp. 10.000,00. Rata-rata pendapatan tersebut jika dikaitkan dengan standart Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Ngawi sudah memenuhi standart minimum. UMR yang berlaku di Kabupaten Ngawi berdasarkan SK No. 188/ 232/ 415.013/ 2000 menunjuk Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 20/ Men/ 2000 adalah sebesar Rp. 212.000,00 per bulan atau sekitar Rp. 7.500,00 per hari (bagian Hukum dan bagian Sosial Pemda Kabupaten Ngawi).

Perbedaan pengeluaran konsumsi dari pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II adalah terutama dalam hal pengalokasian dari kebutuhan untuk sektor tabungannya. Hasrat mengkonsumsi tambahan dari pegawai negeri sipil golongan I adalah lebih besar dibandingkan pegawai negeri sipil golongan II. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh Keynes adalah benar. Keynes berpendapat bahwa hasrat konsumsi marginal ( $MPC$ ) suatu

keluarga atau rumah tangga yang berpendapatan rendah adalah lebih tinggi dari hasrat konsumsi marginal golongan rumah tangga yang berpendapatan tinggi ( Thomas F.D, 1972: 91 ).

Nilai koefisien korelasi ( $r$ ) dari analisis data yang diperoleh dari pegawai negeri sipil daerah golongan I menunjukkan nilai sebesar 27,85 dan setelah diuji dengan menggunakan t-hitung maka hasilnya adalah  $t_h$  lebih besar dari  $t_\alpha$  yang berarti ada pengaruh yang kuat antara tingkat pendapatan ( $Y_d$ ) dengan pengeluaran konsumsi dari masing-masing keluarga pegawai negeri sipil daerah golongan I. Demikian pula pengeluaran konsumsi daripada pegawai negeri sipil daerah golongan II mempunyai nilai koefisien korelasi ( $r$ ) sebesar 59,57. Nilai  $r$  dari pegawai negeri sipil daerah golongan II lebih besar dari nilai ( $r$ ) golongan I ( $59,57 > 27,85$ ) yang berarti bahwa pengaruh pendapatan yang diperoleh terhadap pengeluaran konsumsi dari keluarga pegawai negeri sipil daerah golongan II adalah sangat kuat. Perbedaan korelasi ( $r$ ) dari pegawai negeri sipil daerah golongan I dan pegawai negeri sipil daerah golongan II menunjukkan bahwa tingkat pendapatan pegawai negeri sipil daerah golongan II lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendapatan pegawai negeri sipil daerah golongan I. Dengan kata lain besar kecilnya pendapatan yang diperoleh tergantung dari besar kecilnya pendapatan yang diterima. Pengeluaran konsumsi dari pegawai negeri sipil daerah dapat dilihat pada tabel yang tertera sebagai berikut :

Tabel 4.6 Perbedaan Pengeluaran Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II

Pegawai negeri sipil daerah	$C_0$	$b$	$r$	Pengeluaran konsumsi
Golongan I	1227,33	0,70	27,58	$C = 1227,33 + 0,70Y_d$
Golongan II	8990,66	0,65	59,57	$C = 8990,66 + 0,65Y_d$

Sumber: Data didapat dari analisis data sampel

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di bab IV maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perubahan pendapatan yang diterima oleh masing pegawai negeri sipil daerah baik golongan I maupun golongan II sangat mempengaruhi pengeluaran konsumsi dari tiap-tiap keluarga pegawai negeri sipil tersebut. Perubahan pendapatan (  $\Delta Y$  ) yang diterima oleh masing-masing keluarga pegawai negeri sipil daerah dialokasikan untuk berbagai tingkat kebutuhan.
2. Pengeluaran konsumsi dari keluarga pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata. Pegawai negeri sipil daerah golongan I mempunyai pengeluaran konsumsi  $C = 1277,33 + 0,70Y_d$  yang berarti bahwa setiap ada penambahan pendapatan sebesar Rp. 1277,33, 70% digunakan untuk konsumsi dan 30 % untuk kebutuhan tabungan. Pengeluaran konsumsi dari pegawai negeri sipil daerah golongan II adalah  $C = 8990,66 + 0,65Y_d$  yang berarti setiap ada penambahan pendapatan sebesar Rp. 8990,66 digunakan 65% untuk konsumsi dan 35% digunakan untuk tabungan. Jadi jelas terdapat pengeluaran konsumsi antara pegawai negeri sipil daerah golongan I dan golongan II. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi perbedaan pengeluaran konsumsi dari masing-masing keluarga pegawai negeri sipil tersebut.

## 5.2 Saran

1. Bagi pegawai negeri sipil daerah baik dari golongan I maupun golongan II hendaknya mencari waktu luang di luar jam dinas kantor dalam mencari penghasilan sampingan agar tidak meninggalkan profesi pokoknya sebagai pegawai negeri.
2. Pegawai negeri sipil harus dapat berfikir dan bertindak secara lebih rasional dalam mengalokasikan pendapatan yang diterima tiap bulan baik dari gaji maupun pendapatan dari usaha tambahannya.
3. Pemerintah hendaknya memperhatikan dan mengupayakan tentang tingkat kesejahteraan dari pegawai negeri sipil khususnya golongan I dan golongan II agar produktifitas pegawai negeri sipil menjadi lebih baik. Tingkat kesejahteraan yang baik akan dapat mengurangi kesibukan pegawai negeri sipil dalam mencari penghasilan tambahan sehingga perhatiannya dapat terpusat kepada tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackley, Gardner, 1961, *Teori Ekonomi Makro*, universitas Indonesia, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik, 1998, *Ngawi dalam Angka*, BPS Ngawi.
- Dajan, Anto, 1986, *Pengantar Metode Statistik I*, LP3ES, Jakarta.
- Denburg, F. Thomas, Ducan MMC, dougall, 1972, *Ekonomi Makro*, Terjemahan Paul Sitohang, SE, Bharata, Jakarta.
- Dwidjoesastro, Soenardi, U.S. Kuncorohadi, Harmanti, 1987, *Administrasi Kepegawaian*, Karunika, Jakarta.
- Ghufron, Ahmad, Sudarsono, 1991, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1985, *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Bandung.
- Harijono, Zainuri, 1998, *Analisis Deskriptif Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kondisi Perekonomian daerah Di propinsi Jawa Timur*, Unversitas Jember (tidak dipublikasikan).
- Himpunan Peraturan Pemda Kabupaten Ngawi 1998-2000, Bagian Hukum dan Bagian Sosial Pemda Kabupaten Ngawi.
- Lipsey, Richard, 1995, *Pengantar Makro Ekonomi*, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Marsono, 1974, *Pembahasan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974*, Yogyakarta.
- Nazir, Moh, 1988, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia
- Nopirin, 1986, *Ekonomi moneter I*, Edisi III, BPFE, Yogyakarta.
- Oetari, Wiwik, 1995, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II Pemda Kotamadya Surabaya*, Fakultas Ekonomi Unversitas Jember (tidak dipublikasikan).
- Partadiredja, Ace, 1981, *Perhitungan Pendapatan Nasional*, LP3ES, Jakarta.

Lampiran 2 : JUMLAH PERUBAHAN PENDAPATAN PER BULAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II ( RUPIAH )

sampel (n)	Jumlah Pendapatan Bulan Pertama PNS Golongan II (Y1)		Jumlah Pendapatan Bulan Kedua PNS Gol. II (Y2)		$\Delta Y$ (Y2 - Y1)
	pokok	sampingan	Pokok	Samping	
1	646400	20.000	646400	40.000	20.000
2	686200	200.000	686200	300.000	100.000
3	677700	150.000	677700	320.000	170.000
4	750000	35.000	750000	70.000	35.000
5	761200	45.000	761200	85.000	40.000
6	607800	100.000	607800	170.000	70.000
7	596800	55.000	596800	106.000	51.000
8	662400	75.000	662400	90.000	15.000
9	700000	50.000	700000	90.000	40.000
10	850000	20.000	850000	102.000	82.000
11	430000	30.000	430000	65.000	35.000
12	625000	15.000	625000	32.000	17.000
13	522100	40.000	522100	105.500	65.500
14	800000	60.000	800000	85.000	50.000
15	900000	50.000	900000	45.000	40.000
Jumlah	10215600	945.000	10215600	1.705.500	1.152.000
Rata - rata	518.333,33	63.000	518.333,33	113.700	50.700
Persentase	70%	8%	100%	14%	100%

Lampiran 3 : JUMLAH PERUBAHAN PENGELUARAN PER BULAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I ( RUPIAH )

sampel (n)	Jumlah Pengeluaran Bulan Pertama PNS Gol. I (C1)		Jumlah Pengeluaran Bulan Kedua PNS Gol. I (C2)		ΔC (C2 - C1)
	pokok	sampungan	Pokok	Samping	
1	248.000	160.000	248.000	180.000	20.000
2	300.000	125.000	300.000	150.000	25.000
3	250.000	165.000	250.000	250.000	85.000
4	200.000	125.000	200.000	175.000	50.000
5	250.000	100.000	250.000	145.000	45.000
6	300.000	200.000	300.000	230.000	30.000
7	320.000	250.000	320.000	320.000	70.000
8	360.000	155.000	360.000	240.000	85.000
9	500.000	300.000	500.000	350.000	50.000
10	150.000	75.000	150.000	130.000	55.000
11	250.000	200.000	250.000	225.000	25.000
12	225.000	120.000	225.000	165.000	45.000
13	200.000	95.000	200.000	115.000	20.000
14	400.000	250.000	400.000	285.000	35.000
15	200.000	150.000	200.000	172.000	22.000
Jumlah	6.153.000	2.470.000	6.623.000	3.132.000	540.000
Rata - rata	410.200,00	164.666,67	441.533,33	208.800,00	44.133,33
Persentase	93%	37%	100%	84%	43%

Lampiran 4 : JUMLAH PERUBAHAN PENGELUARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II ( RUPIAH )

sampel (n)	Jumlah Pengeluaran Bulan Pertama PNS Gol. II (C1)		Jumlah Pengeluaran Bulan Kedua PNS Gol. II (C2)		Δ C (C2 - C1)
	pokok	sampingan	Jumlah	Jumlah	
1	300.000	150.000	450.000	300.000	100.000
2	500.000	250.000	750.000	300.000	50.000
3	600.000	200.000	800.000	280.000	80.000
4	300.000	100.000	400.000	125.000	25.000
5	550.000	300.000	850.000	320.000	20.000
6	250.000	100.000	350.000	165.000	65.000
7	500.000	240.000	740.000	255.000	15.000
8	800.000	500.000	1.300.000	550.000	50.000
9	350.000	150.000	500.000	185.000	35.000
10	400.000	80.000	480.000	115.000	35.000
11	300.000	95.000	395.000	190.000	95.000
12	350.000	200.000	550.000	285.000	85.000
13	550.000	50.000	600.000	200.000	150.000
14	525.000	100.000	625.000	130.000	30.000
15	500.000	250.000	750.000	315.000	65.000
Jumlah	6.775.000	2.765.000	9.540.000	3.665.000	750.000
Rata - rata	451.666,67	184.333,33	636.000,00	244.333,33	60.000,00
Persentase	71%	29%	100%	35%	



Lampiran 5 : MARGINAL PROPENSITY TO CONSUME PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I DAN GOLONGAN II

Pegawai Negeri Sipil Golongan I				Pegawai Negeri Sipil Golongan II			
Sampel (n)	$\Delta C$	$\Delta Y$	MPC	Sampel (n)	$\Delta C$	$\Delta Y$	MPC
1	20.000	30.000	0,67	1	90.000	120.000	0,75
2	25.000	50.000	0,70	2	50.000	100.000	0,50
3	85.000	35.000	0,80	3	80.000	170.000	0,47
4	50.000	25.000	0,75	4	25.000	35.000	0,71
5	45.000	25.000	0,78	5	20.000	40.000	0,50
6	30.000	15.000	0,60	6	65.000	70.000	0,93
7	70.000	69.600	0,79	7	40.000	80.000	0,50
8	85.000	15.000	0,83	8	50.000	70.000	0,71
9	50.000	14.700	0,90	9	35.000	40.000	0,88
10	55.000	50.000	0,86	10	35.000	82.000	0,43
11	25.000	15.000	0,75	11	95.000	35.000	2,71
12	45.000	40.000	0,90	12	85.000	115.000	0,74
13	20.000	12.000	0,67	13	50.000	65.500	0,76
14	35.000	55.000	0,73	14	30.000	50.000	0,60
15	22.000	15.000	0,88	15	25.000	40.000	0,63
Jumlah	662.000	466.300	10,50	Jumlah	900.000	760.500	9,77
Rata-rata	44.133	31.087	0,70	Rata-rata	60.000	50.700	0,65

Lampiran 6 : TINGKAT DISPORIBILE INCOME (Yd) DAN TINGKAT KONSUMSI (C) PER BULAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I (RUPIAH)

Sampel (n)	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	X.Y	A (X - X)	A <sup>2</sup>	B (Y - Y)	B <sup>2</sup>
1	502400	300000	252405760000	90000000000	150720000000	-81847	6698876844	-13667	1867777
2	600000	300000	360000000000	90000000000	180000000000	15753	248167511	-13667	1867777
3	522100	250000	272588410000	62500000000	130525000000	-62147	3862208178	-63667	4053444
4	500850	200000	250850722500	40000000000	100170000000	-83397	6955004011	-113667	12920111
5	750000	250000	562500000000	62500000000	187500000000	165753	27474167511	-63667	4053444
6	700000	400000	490000000000	160000000000	280000000000	115753	13398834178	86333	7453444
7	800000	320000	640000000000	102400000000	256000000000	215753	46549500844	6333	40111
8	675000	360000	455625000000	129600000000	243000000000	90753	8236167511	46333	2146777
9	533800	500000	284942440000	250000000000	266900000000	-50447	2544866178	186333	34720111
10	562000	350000	315844000000	122500000000	196700000000	-22247	494914178	36333	1320111
11	530100	250000	281006010000	62500000000	132525000000	-54147	2931861511	-63667	4053444
12	562100	325000	315956410000	105625000000	182682500000	-22147	490474844	11333	128444
13	522100	200000	272588410000	40000000000	104420000000	-62147	3862208178	-113667	12920111
14	500850	400000	250850722500	160000000000	200340000000	-83397	6955004011	86333	7453444
15	502400	300000	252405760000	90000000000	150720000000	-81847	6698876844	-13667	1867777
Jumlah	8763700	6153000	5257563645000	1567625000000	2447227700000	0	137401132333	0	114301733
Rata - rata	584246667	410200	350504243000	104508333333	184146833333	0	9160075489	0	6121555

Lampiran 7 : TINGKAT DISPORIBLE INCOME (Yd) DAN TINGKAT KONSUMSI (C) PER BULAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II (RUPIAH)

Sampel (n)	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	X.Y	A (X - X)	A <sup>2</sup>	B (Y - Y)	B <sup>2</sup>
1	646400	300000	417832960000	900000000000	193920000000	-34640	1199929600	-151666.7	230027777
2	686200	500000	470870440000	250000000000	343100000000	5160	26625600	48333.33	23361111
3	677700	600000	459277290000	360000000000	406620000000	-3340	11155600	148333.3	220027777
4	750000	300000	562500000000	900000000000	225000000000	68960	4755481600	-151666.7	230027777
5	761200	550000	579425440000	302500000000	418660000000	80160	6425625600	98333.33	96694444
6	607800	250000	369420840000	625000000000	151950000000	-73240	5364097600	-201666.7	406694444
7	596800	500000	356170240000	250000000000	298400000000	-84240	7096377600	48333.33	23361111
8	662400	800000	438773760000	640000000000	529920000000	-18640	347449600	348333.3	121336111
9	700000	350000	490000000000	122500000000	245000000000	18960	359481600	-101666.7	10336111
10	850000	400000	722500000000	160000000000	340000000000	168960	28547481600	-51666.67	26694444
11	430000	300000	184900000000	900000000000	129000000000	-251040	63021081600	-151666.7	230027777
12	625000	350000	390625000000	122500000000	218750000000	-56040	3140481600	-101666.7	10336111
13	522100	550000	272588410000	302500000000	287155000000	-158940	25261923600	98333.33	96694444
14	800000	525000	640000000000	275625000000	420000000000	118960	14151481600	73333.33	53777777
15	900000	500000	810000000000	250000000000	450000000000	218960	47943481600	48333.33	23361111
Jumlah	10215600	6775000	7164884380000	3368125000000	4657475000000	0	207652156000	0	308083333
Rata - rata	518333.33	451666.6667	477658958667	224541666667	310498333333	0	13843477067	0	205388888

**Analisis Data**

PERHITUNGAN POLA KONSUMSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
GOLONGAN I DAN GOLONGAN II

**Pola Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Daerah golongan I**

$$C = Co1 + bYd1$$

Keterangan :

Mencari nilai

$$b = MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{540000}{765000} = 0,70$$

Mencari nilai Co1 :

$$Co1 = \bar{Y} - b\bar{X} = 410200 - (0,7)584246,66 = 1227,33$$

Jadi nilai Co1 adalah sebesar Rp 1227,33

Test terhadap parameter b dan Co1 :

Mencari nilai ei :

$$\begin{aligned} ei &= \sum B - (b) x \sum A \\ &= 114301733333 - (0,7)^2 x 137401132333 \\ ei^2 &= 4697517847 \end{aligned}$$

Mencari nilai  $\sigma^2$

$$\sigma^2 = \frac{ei^2}{n-2} = \frac{469751784}{15-3} = 3613475267$$

Mencari varians untuk parameter b :

$$\begin{aligned} S_b &= \sqrt{\frac{\sigma^2}{\sum A^2}} = \sqrt{\frac{3613475267}{137401132333}} \\ &= \sqrt{0,026298729} = 0,16 \end{aligned}$$

T-test :

Ho : b = 0 ; dimana Ho ditolak jika  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $t_h \leq -t_\alpha$

Hi :  $b \neq 0$  ; dimana Ho diterima jika  $-\alpha \leq t_h \leq t_\alpha$

Mencari Varians untuk parameter Co :

$$S_{Co} = \sqrt{\frac{\sum X}{n \sum A}} = \sqrt{\frac{5257563645000}{15 \times 137401132333}}$$

$$= 1,30$$

Pengujian nilai b dan nilai Co dengan uji t-test dengan level of signifikan 5% dan degree of freedom n-2 dan jumlah sampel n =15 maka nilai t dari tabel =  $t_{0,025} = 2,160$ . Pengujian nilai b dan nilai Co dengan t hitung :

$$t_h = \frac{b}{S_b} = \frac{0,7}{0,16} = 4,37$$

$$t_{Co} = \frac{Co}{S_{Co}} = \frac{1227,33}{1,30} = 944,1$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas nilai t-hitung = 4,37 sehingga  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $4,37 \geq 2,160$ , maka Ho ditolak yang berarti mempunyai beda yang berarti dengan nol atau slope dari garis regresi adalah significant atau slope dari pola konsumsi :

$C = Co + bY_d$  adalah significant

Berdasarkan pada hasil dari t-hitung menunjukkan bahwa  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $944,1 \geq 2,160$ , maka Ho ditolak yang berarti mempunyai beda yang berarti dengan nol.

T-test :

Ho :  $Co = 0$  ; dimana Ho ditolak jika  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $t_h \leq -t_\alpha$

Hi :  $Co \neq 0$  ; dimana Ho diterima jika  $-\alpha \leq t_h \leq t_\alpha$

Mencari Nilai Koefisien ( r ) :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

$$r = \frac{15(2447227700000) - (8763700)(6153000)}{\sqrt{15(5257563645000) - (8763700)^2} \sqrt{15(1264129000000) - (6153000)^2}}$$

$$r = \frac{3670841550000 - 5392304610000}{\sqrt{20610169900} \sqrt{188974740000}}$$

$$r = \frac{.172146306000}{143562,4251 \times .434712,2497}$$

$$r = \frac{.172146306000}{.6240834479}$$

$$r = 27,58$$

Test terhadap korelasi ( r )

$$t_h = r\sqrt{(n-1)}$$

$$t_h = 27,58\sqrt{14}$$

$$t_h = 27,58 \times 3,742$$

$$t = 103,19$$

T-test :

Ho : Co = 0 ; dimana Ho ditolak jika  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $t_h \leq -t_\alpha$

Hi : Co  $\neq$  0 ; dimana Ho diterima jika  $-t_\alpha \leq t_h \leq t_\alpha$

Oleh karena  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $103,19 \geq 2,160$ , maka Ho ditolak berarti memang ada korelasi atau pengaruh yang berarti antara variabel Yd dan C.

Jadi persamaan garis regresi atau pola konsumsi Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I adalah :

$$C = 1227,33 + 0,70Y_d$$

### Pegawai Negeri sipil Daerah Golongan II

$$C = Co_2 + bY_{d2}$$

Keterangan :

Mencari nilai b

$$b = MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{750000}{1152000} = 0,65$$

Mencari nilai Co2 :

$$\begin{aligned} Co &= \bar{Y} \cdot b\bar{X} \\ &= 518333,33 \cdot (0,65)(451666,667) \\ &= 8990,66 \end{aligned}$$

Jadi nilai Co2 adalah sebesar Rp.8990,66

Test terhadap parameter b dan Co2 :

Mencari nilai ei :

$$\begin{aligned} ei &= \sum B - (b) \times \sum A \\ &= 308033333333 \cdot (0,6)^2 (207652156000) \\ &= 308083333333 \cdot 7475477616 \\ ei^2 &= 30060785570 \end{aligned}$$

Mencari nilai  $\sigma^2$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{ei^2}{n-2} = \frac{30060785570}{15-2} \\ &= 2312368121 \end{aligned}$$

Mencari varians terhadap Parameter b :

$$\begin{aligned} S_b &= \sqrt{\frac{\sigma^2}{\sum x^2}} = \sqrt{\frac{2312368121}{27076521156000}} \\ &= 0,09 \end{aligned}$$

T-test :

Ho : b = 0 ; dimana Ho ditolak jika  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $t_h \leq -t_\alpha$

Hi : b  $\neq$  0 ; dimana Ho diterima jika  $-t_\alpha \leq t_h \leq t_\alpha$

Pengujian nilai b dan nilai Co dengan uji t-test dengan level of signifikan 5% dan degree of freedom n-2 dan jumlah sampel n =15 maka nilai t dari tabel =  $t_{0,025} = 2,160$

Mencari Varians untuk parameter Co :

$$S_{Co} = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n \sum A}} = \sqrt{\frac{7164884380000}{15(20765256000)}}$$

$$S_{Co} = \frac{7164884340000}{311478234000}$$

$$S_{Co} = \sqrt{23,00}$$

$$S_{Co} = 4,79$$

Pengujian nilai b dan Co dengan t hitung :

$$t_h = \frac{b}{S_b} \quad t_h = \frac{0,6}{0,09} = 6,66 \quad t_h = \frac{Co}{S_{Co}} = \frac{18.333,33}{4,79} = 3827,41$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas nilai t-hitung = 6,66 sehingga  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $6,66 \geq 2,160$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti mempunyai beda yang berarti dengan nol atau slope dari garis regresi adalah significant atau slope dari pola konsumsi :

C = Co + bY<sub>d</sub> adalah significant

Berdasarkan pada hasil dari t-hitung menunjukkan bahwa  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $3827,41 \geq 2,160$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti mempunyai beda yang berarti dengan nol.

Mencari Nilai Koefisien ( r ) :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \cdot \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r = \frac{15(4657475000000) \cdot (10215600)(6775000)}{\sqrt{15(716488438000) - (10215600)^2} \cdot \sqrt{15(3368125000000) - (6775000)^2}}$$

$$r = \frac{691704056000}{119610086770} = 59,57$$

Test terhadap korelasi ( r )

$$t_h = r \sqrt{\frac{n-1}{1-r^2}}$$

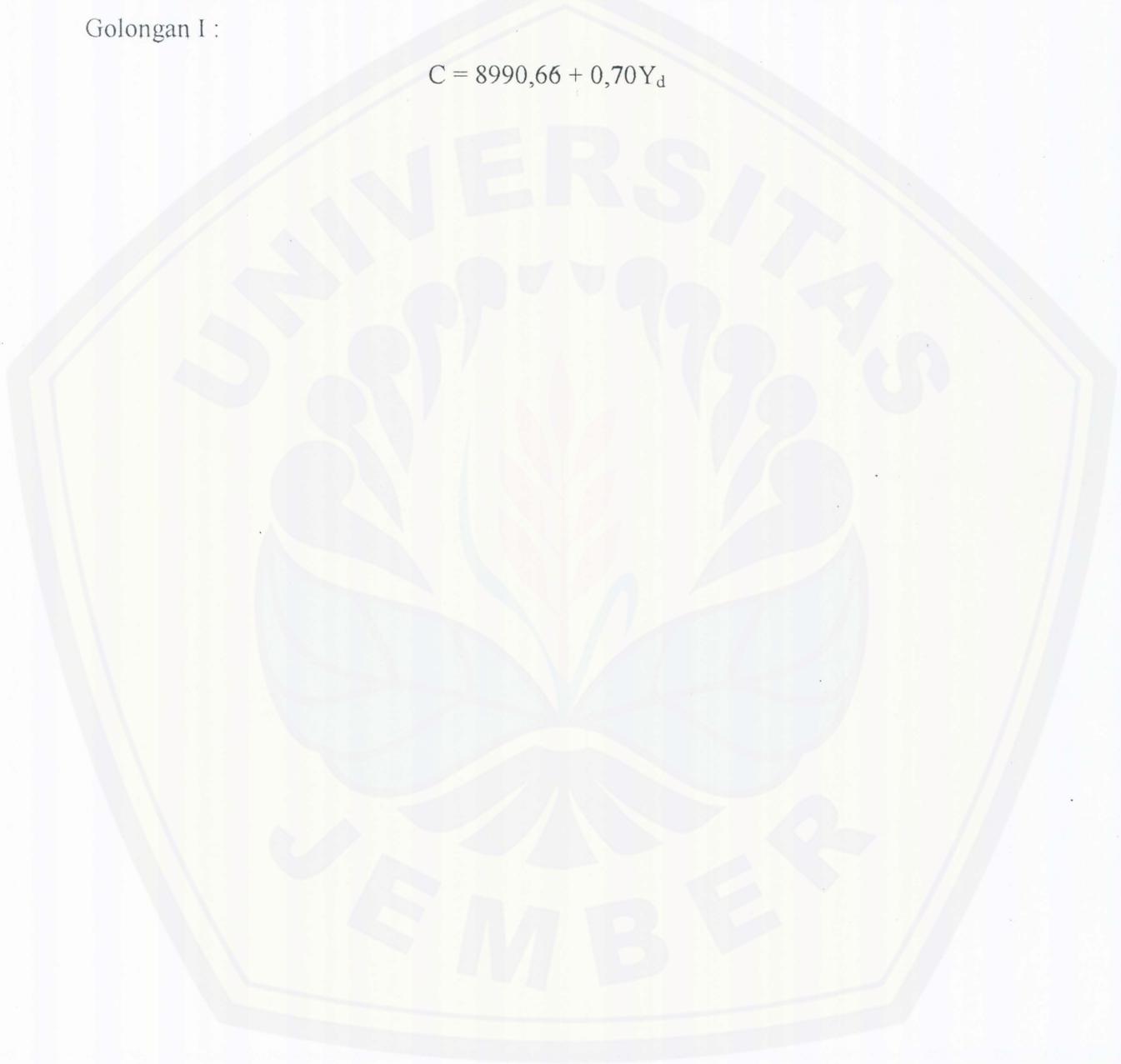
$$t_h = 59,57 \sqrt{14}$$

$$t_h = 59,57 \times 3,742 = 222,910$$

Oleh karena  $t_h \geq t_\alpha$  atau  $59,57 \geq 2,160$ , maka  $H_0$  ditolak berarti memang ada korelasi atau pengaruh yang berarti antara variabel  $Y_d$  dan  $C$ .

Jadi persamaan garis regresi atau pola konsumsi Pegawai Negeri Sipil daerah Golongan I :

$$C = 8990,66 + 0,70Y_d$$



**KUISIONER RESPONDEN**

Dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas akhir studi, maka penulis memohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. Agar diperoleh masukan yang berarti penulis berharap agar kuisisioner ini dapat diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu penulis ucapkan terima kasih.

JUDUL SKRIPSI:

**PENGARUH PERUBAHAN PENDAPATAN TERHADAP POLA KONSUMSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GOLONGAN I DAN GOLONGAN II DI KABUPATEN NGAWI**

PEMBIMBING: I. Drs. Bambang Yudono

II. Dra. Anifathul Hanim

Penyusun : Rini Widyawati  
NIM : 96-1230  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

**DAFTAR PERTANYAAN****I. Data Identitas Responden**

1. Nama : .....
2. Tempat/tanggal lahir : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Alamat : .....
- .....



10. Dalam tiap bulannya berapa persen pendapatan yang digunakan untuk tabungan ?

Jawab: .....

11. Setiap mendapatkan tambahan pendapatan biasanya dialokasi pada kebutuhan apa ?

Jawab: .....

Keterangan:

.....  
.....

12. Jika ada salah satu dari anggota keluarga bapak/ibu yang sudah bekerja, apakah dalam tiap bulannya memberikan sumbangan yang berarti dalam membantu memenuhi kebutuhan hidup ?

Jawab: .....

Alasan:.....  
.....

III. Data Kuisisioner Penunjang

1. Motivasi utama bapak/ibu mencari tambahan pendapatan selain dari gaji PNS?

Jawab: .....

.....  
.....

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang penulisan skripsi yang bertema seperti tersebut di depan ?

Jawab: .....

.....  
.....

3. Menurut bapak/ibu, bagaimana seharusnya pemerintah menanggapi tentang kesejahteraan PNS khususnya golongan I dan golongan II ?

Jawab: .....

.....  
.....

4. Apa saran bapak/ibu kepada penulis berkaitan dengan penyusunan skripsi ini ?

Jawab: .....

.....  
.....

Penulis

Rini Widyawati

